



!" # \$ "% !"&" #"" # ( ) \* + " # , " #-. , " , ./#0-" 0 1 "("  
) /& , " \* " ! " . " / #0 2 " \* # "" " 0 " ( " 0 , " "- " "  
) ( / , ! ( - " / 3 " # " 3 " ! " . " 4 / #0 2 " \* + " # 0 0 / " , # "  
! ! " - ( 3 " , " . " ## / # 3 " ! " ) - ( 3 " " + " 5  
! % ! "& " " 0 & ! / # " , # " & " \* . ( 0 ! . ) " , & ! / 4 " , " , " \* "  
( " # - " # - . - " - 0 3 "& . ( " " , " ) ( 2 , / - . 6 . " 0 - ( 3 "  
# "" # ( ) \* + " # ! ( 0 " # - / . " , ) " , " # ) ( /  
# " . / ( / 3 " # " ! " . " / #0 2 " \* # "" " 0 " ( " 0 , "  
"- " " , # " ( . / ( " ( 0 , 5

# # . \$ 7 % " 0 " \* + " . 8 7 9 , " # : , " # " 0 " ( # " ( " ) ! \* - , 2 0 "  
"& / 7 ; 5  
% , " # : , " # 2 2 ( < "& / 7 ; = . . " # 2 - 2 - : ) 2 - 2 -  
) # "" " 8 ! " ( " # " ( " ) ! \* - , 2 0 " "& / 7 ; =  
2 2 ( " ! "& " ! " ( " # " ( " ) ! \* - , 2 0 " " 2 2 ( "  
> 7 9 0 ! "# " " . \* "& , / ! "& , # " , " # : , " # 2 2 ( >  
"& / 7 ; ; 8 ! " ( " # " ( " ) ! \* - , 2 0 " "& / 7 ; ;  
2 2 ( 7 ; " ! "& " ! " ( " # " ( " ) ! \* - , 2 0 " " 0 "  
2 2 ( > < ; 9 5  
> % ( . / ( " ( . "& 2 2 ( = "& / 7 ; == . . " # ( " / ( "  
" 3 # "" # ( ) \* 8 ! " ( " # " ( " ) ! \* - , 2 0 " " , 2 0 "  
"& / 7 ; == 2 2 ( 7 7 " ! "& " ! " ( " # " ( " ) ! \* - \* -  
, 2 0 " 2 2 ( > ; < 9 0 ! "# " " . \* "& ! ! ( " ) " - " \* , / ! "&  
. ( - "& ( , # " ( . / ( " ( . "& 2 2 ( " "& /  
8 ! " ( " # " ( " ) ! \* - , 2 0 " "& / 2 2 ( 7 7 9 5  
% ( . / ( " ( . "& 2 2 ( 7 "& / 7 ; ; . . " # " ! " "  
/ #0 2 " \* # "" # ( ) \* 8 ! " ( " # " ( " ) ! \* - ) ! \* -  
, 2 0 " "& / 7 ; ; 2 2 ( " ! "& " ! " ( " # " ( " "  
) ! \* - , 2 0 " 2 2 ( > = 9 5 # " "  
% ( . / ( " ( . "& 2 2 ( ; "& / > . . " # ' " # "  
# " # - . " , "& " , " ! ( & . " # "" # ( "  
) \* 8 ! " ( " # " ( " ) ! \* - , 2 0 " "& / > 2 2 ( 7  
" ! "& " ! " ( " # " ( " ) ! \* - , 2 0 " 2 2 ( > 9 5  
% ) . / 0 " ( 0 , 2 2 ( < = "& / 7 ; ; . . " # / ) /  
" ! " . " / #0 2 " \* # "" # ( ) \* 5

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, diberikan tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttt  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 45 Tahun 2006  
TANGGAL : 26 Mei 2006.

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

No.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli	Pengawas Farmasi dan Makanan Utama	Rp 1.230.000,00
		Pengawas Farmasi dan Makanan Madya	Rp 1.094.000,00
		Pengawas Farmasi dan Makanan Muda	Rp 660.000,00
		Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama	Rp 278.000,00
2	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	Rp 440.000,00
		Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO